

BAB I

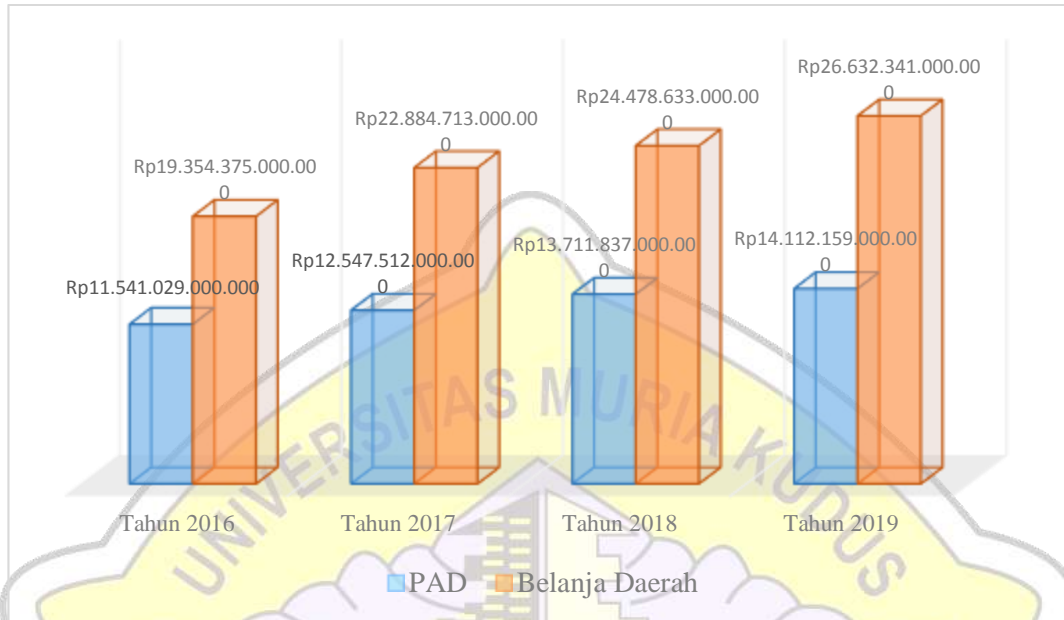
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah. Pratolo (2011) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan pemberian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah tersebut berkewajiban untuk mengendalikan dan mengembangkan suatu daerah itu sendiri dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Adanya pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Maka, untuk memenuhi peningkatan pelayanan fasilitas umum tersebut pemerintah daerah harus dapat mengelola pendapatan daerah secara optimal. Sumber-sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang akan digunakan sebagai pembiayaan pada belanja daerahnya.

Gambar 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2019



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam angka 2020

Gambar 1.1 memperlihatkan adanya fenomena di Provinsi Jawa Tengah dari rentang waktu 2016-2019 yang pada setiap tahunnya PAD dan belanja daerah selalu mengalami peningkatan. Namun, pada setiap tahunnya penerimaan PAD belum mampu dalam mencukupi kepentingan belanja daerah, sehingga pemerintah daerah mengharapkan sokongan dana yang berasal dari pemerintah pusat, yakni dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

“Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan” (UU No. 33 Tahun 2004). Maka dari itu, pengelolaan pada belanja daerah dalam pengalokasian dananya dapat dilakukan secara efektif agar dapat tertinjau dengan baik, sehingga mampu untuk meningkatkan kualitas pada fasilitas

pelayanan umum yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat pada daerah tersebut.

Ratcheting merupakan perencanaan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan pencapaian target pada masa yang akan datang dengan menggunakan informasi kinerja pada masa sebelumnya (Nurhayati, 2018). Pemerintah daerah memerlukan *budget ratcheting* yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan daerah pada periode saat ini berdasarkan dari pemenuhan pencapaian target yang diperoleh pada periode sebelumnya.

Berlandaskan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sumber penerimaan PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan menyatakan bahwa pemerintah daerah menerima pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat yang digunakan untuk membantu menyelesaikan suatu masalah dalam pembiayaan kegiatan operasional daerahnya. Pendapatan transfer tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. “Dana alokasi umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (UU No. 33 Tahun 2004). Oleh sebab itu, penerimaan DAU digunakan pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyatnya dalam hal memperbaiki serta meningkatkan fasilitas pelayanan publik.

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”. DAK bertujuan untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang digunakan sebagai alat penopang bagi masyarakat daerahnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Andrean dan Sari (2020), dimana menguji pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah dan *budget ratcheting* sebagai variabel moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh Andrean dan Sari (2020), meliputi: 1) Adanya penambahan variabel, yaitu dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang bertujuan agar setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama dalam memenuhi kebutuhan belanja daerahnya, serta adanya *budget ratcheting* digunakan untuk menentukan penyusunan anggaran dana alokasi umum pada periode selanjutnya. Sedangkan, dana alokasi khusus ialah dana yang berasal dari APBN yang digunakan sebagai sumber utama dalam pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik di daerah, serta *budget ratcheting* digunakan untuk menentukan penyusunan anggaran dana

alokasi khusus pada periode selanjutnya. 2) Perbedaan pada objek penelitian, jika objek penelitian Andrean dan Sari (2020) adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, maka, objek pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah. 3) Periode penelitian, jika periode yang digunakan pada penelitian Andrean dan Sari (2020) adalah tahun 2013-2017, sedangkan periode pada penelitian ini adalah tahun 2016-2019.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH DENGAN *BUDGET RATCHETING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2019)”**.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah :

1. Variabel yang digunakan pada penelitian ini, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), belanja daerah, dan *budget ratcheting*.
2. Objek penelitian ini, yaitu Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Periode pada penelitian ini, yaitu tahun 2016-2019.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah?
4. Apakah *budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah?
5. Apakah *budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan antara dana alokasi umum dengan belanja daerah?
6. Apakah *budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan antara dana alokasi khusus dengan belanja daerah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah.
2. Untuk mengetahui apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.
3. Untuk mengetahui apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja daerah.

4. Untuk mengetahui apakah *budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah.
5. Untuk mengetahui apakah *budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan dana alokasi umum dengan belanja daerah.
6. Untuk mengetahui apakah *budget ratcheting* berpengaruh terhadap hubungan dana alokasi khusus dengan belanja daerah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian, serta memperluas wawasan penelitian tentang perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya potensi yang dimiliki daerah, serta memberikan masukan untuk diadakannya perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu untuk kemajuan pemerintah daerahnya.

3. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan paparan mengenai pengalokasian dari berbagai sumber pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang digunakan untuk memenuhi peningkatan fasilitas pelayanan publik.